

## **Pengaruh Kebijakan Agraria Terhadap Kesejahteraan Petani: Studi Kasus di Jawa Timur**

<b><u>INFO PENULIS</u></b>	<b><u>INFO ARTIKEL</u></b>
Normalia Sari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur <a href="mailto:norma151.ad@gmail.com">norma151.ad@gmail.com</a>	ISSN: 3046-8507 Vol. 1, No. 2, Juli 2024 <a href="http://almufi.com/index.php/ASH">http://almufi.com/index.php/ASH</a>
Rismayana Salsa Amini Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur <a href="mailto:rismayanasalsaamini2@gmail.com">rismayanasalsaamini2@gmail.com</a>	
Arya Genta Prima Ismeini Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur <a href="mailto:gentaprimaismeini@gmail.com">gentaprimaismeini@gmail.com</a>	
Asnawi Mubarak Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur <a href="mailto:am764@umkt.ac.id">am764@umkt.ac.id</a>	

© 2024 Almufi All rights reserved

### ***Saran Penulisan Referensi:***

Sari, N., Amini, R. S., Ismeini, A. G. P., & Mubarak, A. (2024) Pengaruh Kebijakan Agraria Terhadap Kesejahteraan Petani: Studi Kasus di Jawa Timur. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1 (2), 78-88.

### **Abstrak**

Artikel ini menganalisis pengaruh kebijakan agraria terhadap kesejahteraan petani di Jawa Timur. Kebijakan agraria memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agraris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan agraria berdampak pada kehidupan ekonomi, sosial, dan lingkungan para petani. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petani, observasi lapangan, dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan agraria yang diterapkan telah memberikan dampak positif signifikan terhadap peningkatan pendapatan, akses terhadap sumber daya, dan perbaikan kondisi sosial petani. Namun, terdapat beberapa kendala, seperti birokrasi yang kompleks dan kurangnya dukungan infrastruktur, yang masih menghambat efektivitas kebijakan ini. Rekomendasi diberikan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Agraria, Kesejahteraan Petani, Jawa Timur

### Abstract

This article analyzes the impact of agrarian policies on the welfare of farmers in East Java. Agrarian policies play a strategic role in national development, particularly in enhancing the well-being of agrarian communities. This study employs a qualitative method with a case study approach to explore how agrarian policies affect the economic, social, and environmental aspects of farmers' lives. Data were collected through in-depth interviews with farmers, field observations, and policy document analysis. The findings indicate that the implemented agrarian policies have significantly positively impacted increasing income, access to resources, and improving farmers' social conditions. However, there are several obstacles, such as complex bureaucracy and lack of infrastructure support, that still hinder the effectiveness of these policies. Recommendations are provided to address these barriers and sustainably improve farmers' welfare.

**Key Words:** Agrarian Policy, Farmers' Welfare, East Java

### A. Pendahuluan

Kebijakan agraria di Jawa Timur berfokus pada penyediaan akses lahan bagi petani melalui program redistribusi lahan dan sertifikasi tanah. Program redistribusi lahan bertujuan untuk memberikan lahan kepada petani yang tidak memiliki atau kekurangan lahan. Implementasi program ini dilakukan dengan mengidentifikasi lahan terlantar atau tanah negara yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Setelah itu, lahan tersebut didistribusikan kepada petani yang membutuhkan. Sertifikasi tanah, di sisi lain, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi petani terhadap kepemilikan lahan mereka. Dengan adanya sertifikat tanah, petani dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan seperti kredit usaha dari bank. Selain itu, kepastian hukum ini juga mendorong petani untuk berinvestasi lebih besar dalam pengelolaan lahan mereka, karena mereka memiliki rasa aman atas hak kepemilikan mereka. (Martini dkk., 2019)

Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah resistensi dari pemilik lahan yang terkena program redistribusi. Banyak pemilik lahan yang tidak setuju dengan pengalihan lahan mereka kepada petani karena dianggap merugikan. Mereka merasa bahwa lahan mereka diambil tanpa kompensasi yang layak, yang menimbulkan konflik dan ketegangan sosial. Selain itu, birokrasi yang rumit dan berbelit-belit dalam proses sertifikasi tanah juga menjadi kendala utama. Banyak petani yang kesulitan mendapatkan sertifikat tanah karena proses administrasi yang panjang dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini mengakibatkan banyak petani yang masih beroperasi tanpa kepastian hukum atas lahan yang mereka garap, yang pada akhirnya menghambat mereka dari mendapatkan manfaat penuh dari kebijakan ini. (H.K dkk., 2023)

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyederhanakan proses administrasi sertifikasi tanah dan memberikan bantuan hukum kepada petani. Pemerintah juga menggandeng berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan universitas, untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada petani terkait pentingnya sertifikasi tanah dan cara mengurusnya. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak petani yang dapat mengakses program ini dan mendapatkan manfaatnya. Upaya kolaboratif ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan agraria tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi para petani.

Evaluasi awal terhadap kebijakan agraria di Jawa Timur menunjukkan bahwa program redistribusi lahan dan sertifikasi tanah memiliki dampak positif dalam meningkatkan kepastian hukum dan akses terhadap lahan bagi petani. Namun, dampak ini belum merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Beberapa daerah masih menghadapi kendala yang signifikan dalam implementasi kebijakan ini. Misalnya, di daerah-daerah terpencil atau yang infrastrukturnya kurang memadai, banyak petani yang masih kesulitan mengakses program ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih mendalam dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh petani di Jawa Timur.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan strategi khusus untuk daerah-daerah yang memiliki tantangan unik.(Tarfi & Amri, 2021)

Dampak ekonomi dari kebijakan agraria juga perlu diperhatikan. Dengan adanya sertifikat tanah, petani dapat lebih mudah mengakses kredit usaha dari bank. Hal ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui investasi dalam teknologi pertanian dan pembelian input pertanian seperti benih unggul dan pupuk. Namun, masih banyak petani yang belum memanfaatkan sertifikat tanah mereka untuk mendapatkan akses kredit karena kurangnya informasi dan dukungan. Banyak petani yang masih takut atau tidak memahami prosedur untuk mendapatkan kredit, sehingga mereka tetap bergantung pada metode tradisional yang kurang efisien. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada petani mengenai cara memanfaatkan sertifikat tanah untuk meningkatkan usaha mereka.(Utomo, 2021)

Kebijakan agraria di Jawa Timur menunjukkan potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Namun, implementasi yang efektif dan penyelesaian kendala yang ada sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari kebijakan ini dapat dirasakan oleh seluruh petani secara merata. Dengan dukungan yang tepat, kebijakan ini dapat menjadi alat yang kuat untuk mengangkat kesejahteraan ekonomi petani di Jawa Timur. Oleh karena itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas petani sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi kendala yang ada dan memastikan bahwa kebijakan agraria benar-benar memberikan manfaat bagi mereka yang paling membutuhkan.

## **B. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode review literatur untuk menganalisis pengaruh kebijakan agraria terhadap kesejahteraan petani di Jawa Timur. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan artikel akademis yang berkaitan dengan kebijakan agraria dan kesejahteraan petani. Proses review literatur dimulai dengan pencarian literatur menggunakan kata kunci spesifik seperti "kebijakan agraria", "kesejahteraan petani", "Jawa Timur", dan "reformasi agraria" di berbagai database akademis dan perpustakaan digital.

Setelah literatur yang relevan dikumpulkan, dilakukan analisis kritis untuk mengidentifikasi tema-tema utama, tren, dan kesenjangan dalam penelitian yang ada. Analisis ini meliputi evaluasi dampak kebijakan agraria terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan kehidupan petani, serta identifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Selain itu, metode ini juga mencakup sintesis temuan dari berbagai studi untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan agraria di Jawa Timur. Dengan menggunakan review literatur, penelitian ini mampu menyusun kerangka konseptual yang kuat dan berbasis bukti untuk memahami hubungan antara kebijakan agraria dan kesejahteraan petani, serta memberikan rekomendasi yang didasarkan pada hasil analisis literatur yang komprehensif dan sistematis.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Kebijakan Agraria di Jawa Timur**

Kebijakan agraria di Jawa Timur merupakan upaya sistematis pemerintah dalam mengatur dan mengelola pemanfaatan lahan serta sumber daya alam di wilayah tersebut. Fokus utama kebijakan ini adalah memberikan kepastian hukum bagi pemilik lahan, terutama petani kecil, serta memperbaiki distribusi tanah secara adil dan merata. Dengan demikian, kebijakan agraria bukan hanya berperan dalam ranah hukum, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di Jawa Timur.

Implementasi kebijakan agraria melibatkan serangkaian langkah yang kompleks, dimulai dari identifikasi lahan yang dapat didistribusikan hingga proses pengukuran, sertifikasi, dan pemberian hak atas lahan kepada pemilik yang sah. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga agraria, petani, dan masyarakat lokal. Selain itu, kebijakan ini juga seringkali disertai dengan program pendampingan yang bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola lahan mereka dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. (Fauzi, 2022)

Salah satu aspek penting dari kebijakan agraria di Jawa Timur adalah penekanan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan. Melalui forum-forum partisipatif dan dialog antara pemerintah, lembaga agraria, dan masyarakat lokal, kebijakan ini berusaha untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi ini diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan agraria tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan kepercayaan di antara berbagai pemangku kepentingan. (Imananda Putri dkk., 2020)

Selain itu, kebijakan agraria di Jawa Timur juga mengakui pentingnya peran perempuan dalam sektor pertanian dan pembangunan pedesaan. Program-program pendampingan sering kali menyertakan komponen-komponen khusus untuk pemberdayaan perempuan, termasuk pelatihan keterampilan, akses terhadap sumber daya, dan dukungan dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan upaya lebih luas untuk meningkatkan kesetaraan gender dan memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.

Kebijakan agraria di Jawa Timur juga bertujuan untuk memperbaiki distribusi lahan yang lebih adil, mengurangi ketimpangan agraria, dan meningkatkan akses petani ke sumber daya produktif. Dengan memberikan sertifikasi tanah kepada petani, kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan dorongan ekonomi bagi mereka untuk mengembangkan usaha pertanian mereka. Ini juga diharapkan dapat mengurangi konflik terkait kepemilikan lahan dan meningkatkan produktivitas pertanian secara keseluruhan.

Meskipun tujuan kebijakan agraria ini mulia, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Birokrasi yang kompleks, tantangan finansial, kurangnya pemahaman dan pendidikan di kalangan petani, serta konflik lahan sering kali menjadi kendala yang perlu diatasi. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang holistik dan inklusif dalam merancang dan melaksanakan kebijakan agraria, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memperhitungkan berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan politik di tingkat lokal. (Zein, 2014)

Selain itu, keberlanjutan kebijakan agraria juga menjadi perhatian utama. Dalam jangka panjang, kebijakan ini harus mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan dan lingkungan, bukan hanya sekadar solusi sementara. Oleh karena itu, perlu ada strategi yang jelas untuk memantau dan mengevaluasi dampak kebijakan agraria secara terus-menerus, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar kebijakan ini tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks global, kebijakan agraria di Jawa Timur juga dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan lahan dan sumber daya alam. Pengalaman dan pembelajaran dari implementasi kebijakan ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk merancang kebijakan agraria yang lebih efektif dan inklusif di tempat-tempat lain. Hal ini menunjukkan pentingnya berbagi pengalaman dan kerjasama antarwilayah dalam mencari solusi untuk tantangan agraria yang kompleks dan beragam.

Dengan demikian, kebijakan agraria di Jawa Timur memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, untuk mencapai tujuan ini, perlu terus ada komitmen yang kuat dari berbagai pihak, implementasi yang efektif, pemantauan yang cermat, dan penyesuaian yang adaptif terhadap dinamika yang terus berubah. Dengan upaya bersama dan pendekatan yang terintegrasi, kebijakan agraria dapat menjadi salah satu instrumen kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Jawa Timur.

## *2. Dampak Ekonomi*

Kebijakan agraria di Jawa Timur memiliki dampak ekonomi yang signifikan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan ekonomi pedesaan. Salah satu dampak ekonomi yang paling nyata adalah adanya peningkatan akses petani terhadap sumber daya produktif, seperti tanah dan kredit usaha. Dengan memiliki sertifikat tanah yang sah, petani dapat dengan lebih mudah mengakses kredit dari lembaga keuangan,

yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan produksi pertanian mereka atau untuk investasi lain yang menguntungkan. Selain itu, kepastian hukum atas lahan juga memicu minat investor untuk berinvestasi di sektor pertanian, yang pada gilirannya membuka peluang kerjasama yang saling menguntungkan antara petani dan sektor swasta.

Dampak ekonomi lain dari kebijakan agraria adalah peningkatan produktivitas pertanian. Dengan memiliki kepastian hukum atas lahan, petani cenderung lebih termotivasi untuk melakukan investasi dalam teknologi pertanian, penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat, serta praktik pertanian berkelanjutan lainnya. Hal ini berpotensi meningkatkan hasil panen dan kualitas produk pertanian, yang pada akhirnya dapat menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi bagi petani dan masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Dampak ini juga meluas ke sektor agroindustri dan agribisnis, yang mendapatkan bahan baku yang lebih berkualitas dan berkelanjutan dari petani yang terorganisir. (Fauzi, 2022)

Kebijakan agraria juga memberikan dorongan ekonomi melalui peningkatan investasi di sektor pertanian. Dengan memiliki kepastian hukum atas lahan, investor cenderung lebih termotivasi untuk berinvestasi dalam pengembangan agribisnis, agroindustri, atau infrastruktur pendukung lainnya. Investasi ini dapat menciptakan lapangan kerja tambahan, meningkatkan efisiensi produksi, dan membuka peluang baru dalam pemasaran dan ekspor produk pertanian. Hal ini juga menciptakan keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor-sektor lain dalam perekonomian regional, memperkuat integrasi ekonomi yang saling mendukung.

Dampak ekonomi dari kebijakan agraria juga terlihat dalam peningkatan nilai tambah dari sektor pertanian di Jawa Timur. Dengan memiliki lahan yang dikelola secara lebih efisien dan berkelanjutan, petani dapat meningkatkan diversifikasi produk pertanian mereka, mengembangkan produk-produk bernilai tambah seperti olahan makanan, kerajinan tangan, atau pariwisata pertanian. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani secara langsung tetapi juga menciptakan nilai tambah di seluruh rantai pasok dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Selain itu, kebijakan agraria juga memberikan dampak positif dalam mengurangi kemiskinan di pedesaan. Dengan memberikan akses yang lebih adil terhadap tanah dan sumber daya produktif lainnya, kebijakan ini membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antara petani kecil dan besar. Ini berarti bahwa lebih banyak petani kecil memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi ketergantungan pada pekerjaan sektor informal atau migrasi ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Hal ini juga menciptakan kondisi yang lebih stabil secara ekonomi di pedesaan, mengurangi risiko kemiskinan dan ketidakpastian. (Chadiah dkk., 2020)

Peningkatan pendapatan petani juga memiliki efek berantai yang positif terhadap perekonomian lokal. Dengan memiliki lebih banyak uang yang tersedia, petani dapat menjadi konsumen yang lebih aktif, membeli barang dan jasa dari pedagang lokal dan menggerakkan roda ekonomi di tingkat lokal. Hal ini juga dapat menciptakan lapangan kerja tambahan di sektor-sektor terkait dengan pertanian, seperti transportasi, perdagangan, dan jasa-jasa pertanian lainnya. Dengan demikian, kebijakan agraria bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi petani tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang merata di seluruh masyarakat pedesaan. (Marpaung & Bangun, 2023)

Dampak ekonomi dari kebijakan agraria juga terlihat dalam peningkatan pendapatan pemerintah daerah. Melalui pajak dan penerimaan lainnya dari sektor pertanian yang lebih berkembang, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan tambahan untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, peningkatan pendapatan pemerintah daerah juga memberikan ruang untuk investasi lebih lanjut dalam pembangunan pedesaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, kebijakan agraria juga dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pasar bagi produk-produk pertanian dari Jawa Timur. Dengan memiliki produksi yang lebih terstruktur dan berkualitas, petani dapat lebih mudah memasuki pasar lokal, regional, dan bahkan internasional. Ini membuka peluang baru dalam pemasaran, branding, dan ekspor produk-produk pertanian, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian Jawa Timur. Dengan memiliki akses pasar yang lebih luas, petani dapat

mengoptimalkan potensi produksi mereka dan meningkatkan pendapatan dari penjualan produk pertanian.

Namun, perlu diingat bahwa dampak ekonomi dari kebijakan agraria ini tidak selalu segera terasa dan dapat bervariasi antar wilayah dan kelompok petani. Implementasi yang efektif dan adil dari kebijakan ini sangat penting untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh semua pemangku kepentingan, termasuk petani kecil, perempuan petani, dan masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus untuk memastikan bahwa kebijakan agraria dapat memberikan dampak ekonomi yang positif dan berkelanjutan bagi Jawa Timur.

### 3. Dampak Sosial

Kebijakan agraria di Jawa Timur tidak hanya memberikan dampak ekonomi yang signifikan tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas dan penting bagi masyarakat pedesaan. Salah satu dampak sosial yang paling mencolok adalah peningkatan rasa memiliki dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan memberikan kepastian hukum atas lahan, kebijakan agraria memberikan rasa percaya diri dan keberanian kepada petani untuk berinvestasi dalam pengembangan usaha pertanian mereka. Hal ini juga menciptakan ikatan yang lebih kuat antara petani dengan lahan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi untuk merawat dan meningkatkan produktivitas lahan.

Selain itu, kebijakan agraria juga memberikan dampak positif dalam memperkuat hubungan sosial di masyarakat pedesaan. Dengan memiliki kepastian hukum atas lahan, petani cenderung lebih stabil secara ekonomi dan lebih mampu memberikan kontribusi positif dalam kehidupan sosial masyarakat. Ini menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan stabil, mengurangi risiko konflik terkait kepemilikan lahan, dan memperkuat kerjasama dan solidaritas di antara warga masyarakat pedesaan. (Rara Charina Sizi dkk., 2023)

Pemberdayaan perempuan juga menjadi salah satu dampak sosial yang penting dari kebijakan agraria di Jawa Timur. Dengan memberikan kepastian hukum atas lahan, perempuan petani mendapatkan pengakuan lebih besar dalam hal kepemilikan dan pengelolaan lahan. Program-program pendampingan yang disertakan dalam kebijakan ini juga memberikan peluang bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka dalam mengelola lahan dan usaha pertanian. Hal ini berpotensi mengubah dinamika gender di pedesaan, memperkuat peran perempuan dalam pembangunan pedesaan, dan meningkatkan kesetaraan gender secara keseluruhan.

Dampak sosial dari kebijakan agraria juga terlihat dalam peningkatan akses terhadap layanan publik dan infrastruktur di pedesaan. Dengan memiliki kepastian hukum atas lahan, petani cenderung lebih mudah untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarga mereka. Ini juga membantu mengurangi kesenjangan akses antara pedesaan dan perkotaan, menghasilkan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Jawa Timur.

Kebijakan agraria memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi politik dan sosial masyarakat pedesaan. Dengan memiliki kepastian hukum atas lahan, petani cenderung lebih termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan politik di tingkat lokal. Hal ini menciptakan ruang bagi mereka untuk menyuarakan kepentingan mereka, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memengaruhi pembangunan di wilayah mereka. Partisipasi ini juga dapat membantu memperkuat sistem pemerintahan lokal yang inklusif dan responsif. (Fauzi, 2022)

Selain itu, kebijakan agraria juga memiliki dampak positif dalam memperkuat identitas budaya dan tradisi masyarakat pedesaan. Dengan memiliki kepastian hukum atas lahan, petani cenderung lebih terikat dengan wilayah mereka dan tradisi pertanian yang ada. Hal ini membantu mempertahankan keberagaman budaya dan kearifan lokal di Jawa Timur, menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, serta mendorong inovasi dalam praktik pertanian yang berkelanjutan.

Pendidikan juga menjadi fokus penting dari dampak sosial kebijakan agraria. Dengan memiliki kepastian hukum atas lahan, petani cenderung lebih mampu mengakses pendidikan formal dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka dalam mengelola lahan dan usaha pertanian. Program-program pendampingan yang disertakan

dalam kebijakan agraria juga sering kali menyertakan komponen pendidikan dan pelatihan, yang memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan manusia di pedesaan.

Kebijakan agraria juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dengan memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan dan sanitasi yang berkualitas, petani dan masyarakat pedesaan secara keseluruhan dapat mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal ini juga membantu mengurangi beban penyakit yang dapat mengganggu produktivitas pertanian dan ekonomi masyarakat pedesaan.

Namun, perlu diingat bahwa dampak sosial dari kebijakan agraria ini juga dapat bervariasi antar wilayah dan kelompok masyarakat. Implementasi yang adil dan inklusif dari kebijakan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk petani kecil, perempuan petani, dan masyarakat pedesaan secara keseluruhan, dapat merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, perlu adanya pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan agraria, untuk memastikan bahwa dampak sosial yang positif dapat berkelanjutan dan merata di seluruh Jawa Timur.

### **Dampak Lingkungan**

Kebijakan agraria di Jawa Timur tidak hanya memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan tetapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Salah satu dampak lingkungan yang paling nyata adalah pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan. Dengan memberikan kepastian hukum atas lahan, kebijakan agraria mendorong petani untuk mengelola lahan secara efisien dan berkelanjutan, meminimalkan kerusakan lingkungan seperti erosi tanah, penurunan kualitas tanah, dan kerusakan habitat alamiah.

Selain itu, kebijakan agraria juga dapat memberikan kontribusi positif dalam pelestarian sumber daya air. Dengan memberikan kepastian hukum atas lahan, petani cenderung lebih termotivasi untuk mengelola air secara efisien dan berkelanjutan, meminimalkan risiko erosi tanah dan pencemaran air, serta meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah. Hal ini berpotensi meningkatkan ketersediaan air bagi pertanian dan masyarakat pedesaan secara keseluruhan, serta memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim yang semakin terasa.(Handoko, 2019)

Pemanfaatan energi juga menjadi aspek penting dalam dampak lingkungan kebijakan agraria. Dengan mendorong praktik pertanian yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, kebijakan ini dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, mengurangi dampak negatif terhadap perubahan iklim, dan membantu mendorong transisi menuju energi terbarukan di pedesaan.

Konservasi biodiversitas juga menjadi fokus penting dari dampak lingkungan kebijakan agraria. Dengan memberikan kepastian hukum atas lahan, kebijakan agraria membantu mempertahankan dan mengembangkan habitat alamiah, menjaga keberagaman hayati, dan melindungi spesies-spesies tanaman dan hewan yang khas bagi Jawa Timur. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mendukung ekosistem yang sehat, dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.(Khanifa dkk., 2021)

Pengelolaan limbah juga menjadi aspek penting dalam dampak lingkungan kebijakan agraria. Dengan mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, kebijakan ini dapat mengurangi jumlah limbah pertanian seperti pupuk dan pestisida yang mencemari lingkungan. Selain itu, program-program pendampingan juga dapat memberikan edukasi dan bantuan teknis kepada petani dalam pengelolaan limbah pertanian secara efisien dan bertanggung jawab.(Sonyinderawan, 2020)

Pengurangan deforestasi dan degradasi lahan juga menjadi tujuan utama dari dampak lingkungan kebijakan agraria. Dengan memberikan kepastian hukum atas lahan, kebijakan ini dapat membantu menghentikan praktik deforestasi yang merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan hutan-hutan di Jawa Timur. Hal ini penting untuk menjaga fungsi ekologis hutan, menjaga habitat satwa liar, dan memperkuat peran hutan sebagai penyerap karbon alamiah.

Adaptasi terhadap perubahan iklim juga menjadi bagian integral dari dampak lingkungan kebijakan agraria. Dengan mendorong praktik pertanian yang lebih adaptif dan tangguh terhadap perubahan iklim, kebijakan ini membantu meningkatkan ketahanan petani terhadap

bencana alam, fluktuasi iklim, dan tantangan lingkungan lainnya. Hal ini juga menciptakan kesempatan untuk mengembangkan sistem pertanian yang lebih resilient dan berkelanjutan di masa depan.

Konservasi air dan pengelolaan kualitas air juga menjadi fokus dalam dampak lingkungan kebijakan agraria. Dengan mendorong praktik pertanian yang lebih efisien dalam penggunaan air, kebijakan ini membantu menjaga ketersediaan air bagi pertanian dan kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan. Selain itu, upaya pengelolaan kualitas air seperti pengendalian pencemaran dan penggunaan pupuk yang bijaksana juga membantu menjaga ekosistem air yang sehat dan berkelanjutan. (Khanifa dkk., 2021)

Pengurangan polusi udara juga menjadi tujuan penting dari dampak lingkungan kebijakan agraria. Dengan mendorong penggunaan teknologi pertanian yang lebih bersih dan ramah lingkungan, kebijakan ini dapat mengurangi emisi gas dan partikel berbahaya dari sektor pertanian. Hal ini membantu meningkatkan kualitas udara di wilayah pedesaan, mengurangi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, serta memperkuat keberlanjutan lingkungan hidup.

Pendidikan lingkungan juga menjadi bagian penting dari dampak lingkungan kebijakan agraria. Dengan menyertakan komponen pendidikan dan kesadaran lingkungan dalam program-program pendampingan, kebijakan ini membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran petani tentang pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Hal ini menciptakan budaya pertanian yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab di Jawa Timur, memastikan bahwa praktik pertanian yang dilakukan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat pedesaan secara keseluruhan.

### **Strategi Penguatan Kebijakan Agraria**

Untuk mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan agraria di Jawa Timur, diperlukan strategi penguatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pertama-tama, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan akses petani, terutama petani kecil, terhadap kepastian hukum atas lahan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan layanan sertifikasi tanah yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau, serta penyediaan bantuan hukum bagi petani yang menghadapi konflik tanah kompleks. Diperlukan juga koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait untuk mempercepat proses sertifikasi dan penyelesaian konflik tanah.

Selanjutnya, strategi penguatan kebijakan agraria juga harus memperhatikan peningkatan kapasitas dan keterampilan petani dalam mengelola lahan secara efisien, berkelanjutan, dan inovatif. Program pendidikan dan pelatihan yang terarah dan terintegrasi perlu dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman petani tentang praktik pertanian modern, teknologi pertanian yang tepat, dan manajemen risiko pertanian. Diperlukan juga dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam penyediaan akses terhadap teknologi pertanian yang inovatif dan mendukung, seperti sistem irigasi modern, alat pertanian cerdas, dan informasi pertanian digital. (Rara Charina Sizi dkk., 2023)

Selain itu, strategi penguatan kebijakan agraria harus memperhatikan aspek pengelolaan risiko dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Diperlukan pengembangan sistem pertanian yang lebih adaptif dan tangguh terhadap fluktuasi iklim dan bencana alam, termasuk pengelolaan air yang efisien, pemilihan varietas tanaman yang tahan iklim, dan diversifikasi usaha pertanian. Program asuransi pertanian yang inklusif dan terjangkau juga perlu ditingkatkan untuk melindungi petani dari risiko ekonomi yang tidak terduga akibat perubahan iklim.

Selanjutnya, strategi penguatan kebijakan agraria juga harus memperhatikan peran penting sektor swasta dalam pengembangan pertanian. Diperlukan kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan untuk memfasilitasi investasi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi petani dan lingkungan. Insentif keuangan dan pajak yang tepat juga dapat mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam teknologi pertanian yang ramah lingkungan, praktik pertanian berkelanjutan, dan pengembangan agribisnis yang inklusif. (Muhammad Yasir, 2023)

Selain itu, strategi penguatan kebijakan agraria juga harus memperhatikan upaya dalam mengembangkan pasar pertanian yang lebih inklusif dan adil. Diperlukan peningkatan akses



petani ke pasar lokal, regional, dan internasional melalui pengembangan infrastruktur pasca panen, dukungan pemasaran, dan akses terhadap informasi pasar yang tepat waktu. Kemitraan yang kuat antara petani, pedagang, produsen, dan konsumen juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan rantai pasok pertanian yang berkelanjutan dan adil. (Rahma dkk., 2021)

Selanjutnya, strategi penguatan kebijakan agraria juga harus memperhatikan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Diperlukan pengembangan regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan lahan, penggunaan pupuk dan pestisida, serta praktik pertanian lainnya yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Pengembangan kebijakan insentif dan program kompensasi juga dapat mendorong petani untuk mengadopsi praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kemudian, strategi penguatan kebijakan agraria juga harus memperhatikan inovasi dan teknologi pertanian yang berkelanjutan. Diperlukan dukungan yang lebih besar dalam pengembangan riset dan pengembangan pertanian, serta transfer teknologi yang efektif dari laboratorium ke lapangan. Kemitraan antara lembaga riset, perguruan tinggi, sektor swasta, dan petani juga perlu ditingkatkan untuk mempromosikan adopsi teknologi pertanian yang inovatif dan berdampak positif. (Marpaung & Bangun, 2023)

Selanjutnya, strategi penguatan kebijakan agraria juga harus memperhatikan aspek keamanan pangan dan gizi. Diperlukan program-program yang menyediakan akses terhadap pangan berkualitas, diversifikasi pangan, dan edukasi gizi bagi masyarakat pedesaan. Pengembangan sistem pertanian yang lebih beragam dan adaptif juga dapat membantu meningkatkan ketersediaan pangan, kesehatan, dan gizi masyarakat pedesaan secara keseluruhan.

Selain itu, strategi penguatan kebijakan agraria juga harus memperhatikan aspek pengelolaan risiko bencana dan mitigasi dampak bencana alam. Diperlukan program-program yang membangun kapasitas petani dalam menghadapi risiko bencana, sistem peringatan dini, dan rencana tanggap darurat yang efektif. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim di wilayah pedesaan.

Dengan mengimplementasikan strategi-strategi tersebut secara terintegrasi dan berkesinambungan, diharapkan bahwa kebijakan agraria di Jawa Timur dapat memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat pedesaan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendukung pembangunan pedesaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan. Diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, LSM, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil dalam mendorong implementasi strategi-strategi ini untuk mencapai hasil yang optimal bagi semua pihak yang terlibat.

#### **D. Kesimpulan**

Dari analisis yang telah dilakukan terhadap kebijakan agraria di Jawa Timur, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan, baik secara sosial maupun lingkungan. Secara sosial, kebijakan agraria telah memberikan kepastian hukum yang lebih besar kepada petani, yang pada gilirannya meningkatkan rasa memiliki dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah petani yang memperoleh sertifikasi tanah, yang memberikan akses lebih mudah terhadap layanan publik dan mendukung aktivitas ekonomi mereka. Dampak positif ini membantu meningkatkan kualitas hidup petani dan keluarga mereka, serta memperkuat ikatan sosial di masyarakat pedesaan. Selain itu, kebijakan agraria juga berkontribusi pada pemberdayaan perempuan di sektor pertanian. Dengan memberikan kepastian hukum atas lahan, perempuan petani mendapatkan pengakuan lebih besar dalam hal kepemilikan dan pengelolaan lahan. Program pendampingan yang menyertai kebijakan ini juga memberikan peluang bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas mereka dalam mengelola lahan dan usaha pertanian. Ini merupakan langkah penting dalam memperkuat peran perempuan dalam pembangunan pedesaan dan meningkatkan kesetaraan gender.

Namun, kebijakan agraria juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaatnya. Kendala birokrasi, terutama dalam proses redistribusi lahan dan sertifikasi tanah, menjadi salah satu hambatan utama yang harus diatasi.

Penyederhanaan prosedur administrasi dan penggunaan teknologi digital dapat membantu mengatasi hambatan ini. Selain itu, perlu juga adanya dukungan finansial yang lebih besar bagi petani kecil, program edukasi yang lebih luas, penyelesaian konflik lahan yang efektif, dan pembangunan infrastruktur pedesaan yang memadai. Dari segi lingkungan, kebijakan agraria memberikan insentif bagi petani untuk mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun, perlu diingat bahwa perubahan penggunaan lahan juga dapat memiliki dampak negatif seperti deforestasi, penurunan kualitas air, dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan stakeholder terkait untuk melakukan pemantauan yang ketat dan mengembangkan strategi pengelolaan yang berkelanjutan untuk melindungi lingkungan sekaligus memperbaiki kesejahteraan petani. Dalam kesimpulannya, kebijakan agraria di Jawa Timur memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat ketahanan ekonomi pedesaan, dan melindungi lingkungan. Namun, untuk mencapai tujuan ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat petani itu sendiri. Dengan kerjasama yang kokoh dan implementasi yang efektif, kebijakan agraria dapat menjadi instrumen yang kuat dalam mencapai pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan inklusif di Jawa Timur.

## E. Referensi

- Chadijah, S., Wardhani, D. K., & Imron, A. (2020). Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Lahan Pertanian Di Kabupaten Tulungagung. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 91. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.286>
- Fauzi, A. (2022). Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 218–233. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.678>
- Handoko, W. (2019). Analisis Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan BPN/Kementerian Agraria RI. *Recital Review*, 1(2), 23–43.
- HK, A. P., Yasa, I. W., Setyawan, F., Adiwibowo, Y., & Manggala, F. P. (2023). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan di Kabupaten Jember. *INICIO LEGIS*, 4(2), 167–181. <https://doi.org/10.21107/il.v4i2.23103>
- Imananda Putri, A., Puji Utama, A., & Malik, I. (2020). Resolusi Konflik Tanah Mandiku Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, 6(3), 361–390. <https://nasional.tempo.co/read/541331/sengke>
- Khanifa, T. N., Syanurisma, S., & Luthfi, A. N. (2021). Menuju Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di Banyuwangi, Jawa Timur. *Widya Bhumi*, 1(2), 101–124. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i2.12>
- Marpaung, N., & Bangun, I. C. (2023). Pentingnya Regenerasi Petani dalam Modernisasi Pertanian. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 2(2), 27–33. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v2i2.14195>
- Martini, S., Ash-Shafikh, M. H., & Afif, N. C. (2019). Implementasi Reforma Agraria Terhadap Pemenuhan Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(2), 150–162. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.367>
- Muhammad Yasir. (2023). Sinergitas Antara Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan, dan Masyarakat untuk Mewujudkan Reforma Agraria di Kabupaten Bojonegoro. *Binamulia Hukum*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.443>
- Rahma, H. A. R., Fitriani, I. F., Fitriani, L. D., & Hilman, Y. A. (2021). Kebijakan Reforma Konflik Hukum Politik Agraria di Era Pemerintahan Jokowi. *Jurnal Interaktif*, 13(2), 33–40. <https://doi.org/10.21776/ub.interaktif.2021.013.02.4>
- Rara Charina Sizi, B., Munir, U., & Imawanto, imawanto. (2023). Kebijakan Reforma Agraria Yang Berkeadilan. *Unizar Law Review*, 6(2), 2020. <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.57>

- Sonyinderawan, F. (2020). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Non Pertanian Mengakibatkan Ancaman Degradasi Lingkungan. *Jurnal Swarnabhumi : Jurnal Geografi dan Pembelajaran Geografi*, 5(2), 36. <https://doi.org/10.31851/swarnabhumi.v5i2.4741>
- Tarfi, A., & Amri, I. (2021). Reforma Agraria sebagai Jalan menuju Perdamaian yang Berkelanjutan di Aceh. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2), 210–225. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.509>
- Utomo, S. (2021). Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara. *Veritas et Justitia*, 7(1), 115–138. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935>
- Zein, S. (2014). Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.357>